
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 15, LD Kabupaten Gresik 2013 (15)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini dibentuk untuk melindungi dan menjaga tata kehidupan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, teratur, aman, tertib, tentram, dan sehat di Kabupaten Gresik sebagai daerah industri, maritim, dan niaga yang agamis. Hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai dan memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1, Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011;
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang ketertiban umum yang mencakup koordinasi antar instansi dan penanganan tindak pidana ringan. Peraturan ini memungkinkan Bupati untuk melakukan rapat koordinasi dengan berbagai satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain yang terkait. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan prosedur hukum singkat dalam penanganan tindak pidana ringan, yang memungkinkan eksekusi putusan hakim tanpa memerlukan upaya hukum banding.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku

